

**ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG PANJANG**

Artikel Ilmiah



Oleh:

**ILHAM AKBAR
2008/02132**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

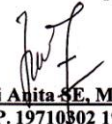
ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG

Oleh :
ILHAM AKBAR
02132 / 2008


Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Maret 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, ... Januari 2014

Pembimbing I


Lili Ajita SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II


Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199603 1 003

ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG

Ilham Akbar

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: ilhamccib@yahoo.com

Abstract

This research tries to analyze Padang Panjang city government policy at education sector in applying Padang Panjang city as education goal city with service and education quality which has competitive thing in all education types and sectors. Government responsibility in applying education is still very big and needed a willing to fix education service, beginning from problem the unfair of chance, the weak of education relevance and quality and also the weak of education applying management. For that, local government is got to do some programs of education development, couple with a willpower to prioritize a budget allocation at education.

This research uses qualitative research approach with descriptive method. Applying of the research informant is done with qualitative research characteristic is purposive sampling. The research informants are Padang Panjang mayor, the head of Padang Panjang, head of Padang Panjang Parliament. The data is collected through observation, interview, and study document. The data validity testing technique is done through observation persistence technique, member check, and triangulation. After the research data is gotten, the data is analyzed through interactive analysis technique as stated by Miles and Huberman.

The result of this research has showed that the free education fee program during 12 years has certain consideration. The general allocation fund and local revenue have an important rule in supporting free education during 12 years. Wisdom which is applied by Padang Panjang government raises a mutual respect for the education participants and education providers, like the part of local revenue for education participants and quality education for education participants. The program which is applied by Padang Panjang government, is applied by Padang Panjang education center well. This is proved by applying which reaches the target in whole activity on work achievement analysis which has done based on LAKIP that reach 72,13%. This number is valued good enough because only Padang Panjang City which is able to waive fees to the students during 12 years.

Keywords: Padang Panjang budget allocation, program and activity, a strategic planning of Padang Panjang City.

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kota Padang Panjang pada bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan dengan layanan dan kualitas pendidikan yang berdaya saing di semua jenjang dan jenis pendidikan. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan masih sangat besar dan diperlukan tekad untuk memperbaiki pelayanan pendidikan, mulai dari persoalan tidak meratanya kesempatan, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, serta lemahnya manajemen penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan berbagai program pembangunan pendidikan, dibarengi dengan tekad untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor pendidikan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penetapan informan penelitian dilakukan dengan karakteristik penelitian kualitatif yaitu *purposive sampling*. Informan penelitian adalah Walikota Padang Panjang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, dan Ketua DPRD Kota Padang Panjang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dilakukan melalui teknik ketekunan pengamatan. Setelah data penelitian diperoleh, data dianalisis melalui teknik analisis interaktif seperti yang disarankan Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang telah menyusun rencana strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bidang pendidikan baik untuk jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Untuk tahun 2012 ada 17 program dengan 77 kegiatan dan anggaran awal sebesar Rp. 20.208.488.500, kemudian terdapat perubahan anggaran menjadi Rp.19.919.840.150 dan terealisasi sebesar Rp.12.548.891.002,- ada 2 kegiatan yang tidak dapat dilakukan sama sekali.

Kata kunci : Anggaran Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Rencana Strategis Kota Padang Panjang.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah secara istilah dapat diartikan sebagai "wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola kepentingan wilayah/daerah dan masyarakat itu sendiri". Dengan adanya desentralisasi maka muncullah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari otonomi bagi satu pemerintahan daerah. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.

Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan masyarakat yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah di tingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi.

Pelayanan umum merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan umum sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan". (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003). Pelayanan umum dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, pemerintah adalah pemberi pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan

kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional. Pelayanan umum (*public services*) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan umum (*public services*) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara). Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah baik ditingkat pusat, maupun daerah. Setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (pasal 28 c Undang-Undang Dasar 1945). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap umat manusia. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hal tersebut. Pada Pasal 31 Ayat (1) diatur bahwa Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Perhatian bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan sangat besar.

Konsepsi desentralisasi pendidikan, berdasarkan Undang-Undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 meliputi dua aspek, yaitu: substantif yang mencakup teknis edukatif, personel, finansial, sarana dan prasarana, serta administratif; dan, fungsi manajemen yang mencakup *planning, organizing, actuating*, dan *controlling*. Konsekuensi diberlakukannya desentralisasi pendidikan adalah terjadinya peran pendidikan yang berkiblat pada inovasi pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat. Sehingga, keberadaan perkembangan pendidikan setiap daerah tentu akan mengalami keberagaman sumber daya, baik dari segi pembiayaan, tenaga kependidikan, kurikulum (lokal), serta mutu yang dihasilkan.

Pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan Kebijakan sekolah gratis 12 tahun bagi warganya yang dilatarbelakangi oleh dua faktor penting. *Pertama*, dari sisi historis Kota Padang Panjang sejak dulu memang terkenal sebagai daerah tujuan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang Panjang memiliki catatan perjalanan tradisi intelektual yang sangat panjang sejak era kolonial Belanda hingga sekarang. Di kota ini terdapat beberapa sekolah agama yang sejak zaman penjajahan menjadi pioner bagi pengembangan insan berilmu dan bertaqwa, seperti Dinyah Puteri, Thawalib Putera, Kauman, Thawalib Gunung dan lain sebagainya. Namun, beberapa dekade belakangan, pamor Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan mulai redup karena kurangnya perhatian Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap pengembangan pertumbuhan dan kualitas pendidikan.

Kedua, mahalny biaya pendidikan yang kemudian menyebabkan rendahnya minat untuk bersekolah, menurunnya semangat, motivasi dan prestasi belajar siswa. Kurangnya perhatian dan keberpihakan elit politik di daerah merupakan penyebab dari rendahnya aspek pembangunan pendidikan di Kota Padang Panjang. Padahal, otonomi daerah sudah berlangsung sejak tahun 1999 yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, belum ada inisiatif dari eksekutif di daerah (walikota dan DPRD) untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang pro rakyat, serta berorientasi kepada

pertumbuhan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Padang Panjang. Masyarakat masih mendapatkan beban yang besar dalam pembiayaan pendidikan di Kota Padang Panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Panjang dan Perda Kota Padang Panjang No. 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Di dalam perda tersebut diatur tentang wajib belajar 12 tahun dan sekolah gratis bagi warga Kota Padang Panjang. Perda tersebut secara tegas mengatakan bahwa, “Setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah” (pasal 6 ayat 1). Untuk mendanai wajib belajar 12 tahun tersebut maka, pemerintah Kota Padang Panjang mengalokasikan anggaran pendidikan pada APBD Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.119.242.270.998,- atau 27,9% dari total APBD Rp.427.790.313.749,-.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Padang Panjang khususnya dalam bidang pendidikan adalah dengan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 12 tahun, dan telah dialokasikan dana sebesar 27,9% dari APBD. Apakah dana sebesar 27,9% ini dapat dipergunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang sebagaimana mestinya, yaitu untuk menuntaskan pelaksanaan program belajar 12 tahun, pemerataan, perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi dan daya saing pendidikan?. Hal inilah yang membuat Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang**”.

TELAAH LITERATUR

Istilah anggaran cukup sering didengarkan dalam keseharian kehidupan bermasyarakat. Mulai dari anggaran belanja rumah tangga, anggaran pembangunan rumah ibadah, anggaran perbaikan jalan, sampai dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam skala nasional. Dari beberapa istilah ini, secara sederhana istilah anggaran dapat dirumuskan sebagai rencana biaya yang diperlukan untuk

melaksanakan suatu hal di masa depan. Dari kaca mata pemerintahan, anggaran merupakan perwujudan dari kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam wujud program yang akan dilaksanakan disertai dengan biaya yang diperlukan/disediakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) dalam Bastian (2006:164), definisi anggaran (*budget*) adalah:

.....*rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.*

Governmental Accounting Standard Board (GASB) turut mendefinisikan anggaran (*budget*) sebagai rencana operasi keuangan yang terdiri atas usulan estimasi pengeluaran dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai pengeluaran tersebut dalam periode waktu tertentu. Dari beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa anggaran merupakan pernyataan kebijakan pemerintah yang terdiri dari aktivitas yang akan dilaksanakan, belanja untuk melaksanakan aktivitas, dan pendapatan untuk membiayai belanja tersebut.

Proses penyusunan anggaran selanjutnya disebut dengan istilah penganggaran. Penganggaran (*budgeting*) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas (Haryanto:2007). Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik. Di Indonesia penganggaran diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (1), dimana setiap tahun anggaran ditetapkan dalam UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penganggaran merupakan suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai dan selanjutnya masing-masing kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu dengan standar biaya yang berlaku. Penyusunan anggaran merupakan suatu rencana tahunan yang merupakan aktualisasi dari perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang, dengan kewenangan yang dimiliki saat ini Pemda dapat menyusun struktur anggaran yang memungkinkan masyarakat dan manajemen pemerintah daerah mengawasi dan mengevaluasi kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan. Deddi (2008) menyatakan bahwa proses penyusunan anggaran daerah meliputi tahap-tahap sebagai berikut: (1) arah dan kebijakan umum anggaran, (2) strategi dan prioritas anggaran, (3) program dan kegiatan, dan (4) anggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian tergolong penelitian kualitatif, dimana proses penelitian akan menghasilkan data deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kota Padang Panjang. Dalam penelitian ini terdapat informan penelitian yang dimanfaatkan untuk dapat memberikan informasi tentang penelitian ini. Para informan diantaranya adalah Walikota Padang Panjang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, dan Ketua DPRD Kota Padang Panjang yang sekaligus Ketua Banggar DPRD dan Koordinator Komisi II yang mengurus masalah pendidikan di Kota Padang Panjang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dari informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi dan arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan

menggunakan metode deskriptif, maka analisisnya menggunakan analisa kualitatif. Untuk mendapatkan data kredibilitas tinggi maka dalam penelitian ini digunakan tiga bentuk pemeriksaan keabsahan, yaitu teknik ketekunan pengamatan, teknik *member check*, dan teknik triangulasi.

Teknik analisis data yang penulis gunakan untuk melakukan analisis secara intensif terhadap data yang diperoleh di dalam lapangan. Langkahnya menurut Miles dan Huberman (1992) yang pertama yaitu pengumpulan data. Kedua yaitu reduksi data. Reduksi data dilakukan untuk memilih dan memusatkan hasil penelitian pada pokok permasalahan. Terakhir yaitu klasifikasi data. Pada bagian ini data yang didapat dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran umum tentang penduduk Kota Padang Panjang menjalani hidup dengan filosofi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Padang Panjang telah lama dikenal sebagai pusat perkembangan pendidikan Islam terbukti dengan kehadiran Perguruan Thawalib, Kauman Muhammadiyah, Diniyah Puteri Rahmah El Yunusiyah, MIN Adam BB bahkan terakhir Pondok Pesantren Serambi Mekkah dan Perguruan Darul Hikmah, dan kehadiran beberapa tokoh yang pernah menjalani pendidikan di Kota Padang Panjang seperti Hamka, M. Natsir, Rahmah El Yunusiyah di pentas internasional.

Kondisi saat ini, tiga tahun terakhir jumlah lembaga pendidikan (sekolah), baik tingkat pendidikan pra sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak mengalami peningkatan. Hal ini apabila dilihat dari topografi Kota Padang Panjang yang bergelombang dan sebagai daerah pegunungan yang mempunyai kelerengan yang cukup tinggi merupakan tantangan tersendiri dalam penggunaan lokasi pembangunan sekolah baru. Jumlah lembaga pendidikan yang ada di Kota Padang Panjang guna memberikan

kesempatan belajar bagi penduduk usia sekolah terlihat pada (tabel 1).

Dari sekian banyak sekolah yang ada di Kota Padang Panjang dari sisi kualifikasi standar baik standar nasional maupun standar internasional belum sebagaimana yang diharapkan. Saat ini Padang Panjang baru memiliki 1 SMA Rintisan Berstandar Internasional yang mesti dipacu menjadi Sekolah Berstandar Internasional dan 2 SMP Rintisan Berstandar Nasional serta 1 SD Rintisan Berstandar Nasional yang mesti dikembangkan menjadi sekolah Berstandar Nasional, di samping beberapa sekolah dengan kualifikasi biasa mesti di dorong untuk minimal menjadi sekolah berstandar nasional. Untuk itu diperlukan berbagai upaya dan pembenahan yang sifatnya menyeluruh, baik dari proses, guru, sarana dan prasarana, pembiayaan dan lain-lain sehingga memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan. Dari segi kualitas pendidikan di Kota Padang Panjang juga sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan tingkat kelulusan mencapai 99% (tabel 2) mulai dari tingkat SD sampai SMTA.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah Program pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Padang Panjang yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Sebagai dasar penyusunan renstra ini adalah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2009 tentang Penyusunan Tata cara Evaluasi Pengendalian Perencanaan Pembangunan, diamanatkan bahwa masing-masing SKPD diharuskan menyusun Rencana Strategis dengan mempedomani dokumen perencanaan lainnya.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Pentingnya peran pendidikan dalam pembangunan menghendaki supaya pembangunan pendidikan dilaksanakan secara terencana, terarah, komprehensif dan berkelanjutan. Untuk itu perlu

adanya perencanaan yang matang sebagai pedoman dan pemberi arah pembangunan pendidikan tersebut disamping pengendali pemanfaatan sumberdaya yang terbatas ketersediaannya. Untuk itu Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang telah menyusun program dan kegiatan guna mewujudkan Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan dengan layanan dan kualitas pendidikan yang berdaya saing di semua jenjang dan jenis pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, untuk tahun 2012 sebagai tahun ke-4 dari pelaksanaan renstra jangka pendek (2008–2013) bidang pendidikan telah disusun beberapa program dan kegiatan serta alokasi anggaran untuk pelaksanaannya.

Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang mengalokasikan dana sebesar Rp. 119.242.270.998 atau 27,9% dari total APBD Rp. 427.790.313.749. Anggaran yang dialokasikan ini digunakan untuk biaya belanja pegawai sebesar Rp. 99.033.782.498 (83,05%), belanja barang Rp. 6.602.763.500 (5,54%) dan belanja modal sebesar Rp. 13.605.725.000 (11,41%). Total anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya yang terdiri dari belanja barang dan modal adalah sebesar Rp. 20.208.488.500 atau (16,95%). Perumusan program dan kegiatan akan berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan. Untuk itu Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang telah merencanakan program, kegiatan serta alokasi dananya seperti dapat dilihat pada tabel 3.

Seluruh anggaran yang telah direncanakan dan dianggarkan, tentu tidak seluruhnya terealisasi sempurna. Realisasi yang tidak sepenuhnya terlaksana memiliki selisih antara anggaran dan realisasi dari program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dari sasaran strategis yang hendak dicapai, pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran di atas terlihat untuk masing-masing sasaran strategis, program dan kegiatan dengan capaian dan realisasi anggaran yang berbeda-beda, yakni:

1. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
2. Program pendidikan menengah

3. Program pendidikan anak usia dini
4. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
5. Program manajemen pelayanan pendidikan
6. Program pendidikan non formal

Seluruh kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tentu tidak seluruhnya berjalan sesuai rencana. Program dan kegiatan yang direncanakan memiliki faktor pendukung dan juga kendala dalam menjalankannya. Beberapa dukungan datang dari masyarakat yang menginginkan pendidikan yang kompeten tanpa dipungut biaya. Namun ada juga beberapa kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pendidikan itu sendiri.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan anggaran, program, kegiatan, pendidikan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang terlaksana dengan baik atau tidak. Berdasarkan hasil yang penulis peroleh, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis kemukakan, yaitu:

- a. Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang belum mampu melaksanakan semua kegiatan dan merealisasikan semua anggaran yang telah dialokasikan. Dalam hal ini ada 2 kegiatan yang tidak bisa terlaksana sama sekali, yaitu kegiatan workshop peningkatan kualitas integritas IMTAQ dan IPTEK bagi guru bidang studi SLTP dan penyediaan jasa dan operasional motor pintar.
- b. Jika dilihat dari besar anggaran APBD yang diberikan untuk bidang pendidikan sebesar Rp. 119.242.270.998,- (27%). Dana ini dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai sebesar Rp. 99.033.782.498,- (83,05%), untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 20.208.488.500,- (16,95%). Kemudian terdapat perubahan anggaran menjadi Rp. 19.919.840.150,-
- c. Dari segi anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan

bidang pendidikan sebesar Rp. 19.919.840.150,- yang terealisasi hanya sebesar Rp. 12.548.891.002,- (63,00%).

- d. Faktor pendukung program dan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yaitu pimpinan memiliki visi pendidikan yang jelas, pendidikan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah, disiplin tenaga kependidikan yang realtif memadai, tingginya angka partisipasi pendidikan, dan pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan.
- e. Faktor penghambat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang adalah sistem, prosedur, dan tata kerja belum sepenuhnya dipahami oleh personil, kerjasama antar personal belum optimal, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, jumlah dan kualitas personil yang belum memadai, dan kualitas pendidikan masih rendah.

Penulis memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan data dan informasi. . Mengingat informan adalah pejabat pemerintah yang informasinya tidak dapat didokumentasikan dengan baik. Selain itu Data sekunder yang peredarannya terbatas sehingga tidak semua data dapat diambil. Serta penulis memiliki keterbatasan baik dari segi pengetahuan, pengalaman dalam melakukan penelitian.

Penulis memberikan saran kepada pemerintah Kota Padang Panjang untuk:

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang sistem, prosedur dan tata kerja kepada para personil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
- b. Mengoptimalkan kerjasama antar personal dengan cara meningkatkan koordinasi antar sesama personal di kalangan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
- c. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan agar tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

- d. Menambah sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kalangan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, agar pencapaian program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik "Akuntansi Keuangan Daerah"*. Salemba Empat : Jakarta
- Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers : Jakarta
- Brahmantio Isdijoso. 2002, *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)*, Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 6 No. 1
- Darwanto. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X : Universitas Hassanudin
- Deddi Nordiawan, 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta
- Haryanto, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. UNDIP: Semarang
- Herbert Blumer, 1987. *Sociological Analysis and the Variable*. Methodological Contributions to Sociology: Chicago
- Holtz-Eakin. 1994. *Intertemporal analysis of state and local government spending: Theory and test*. Journal of Urban Economics 35: 159-174
- Indra Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga: Jakarta
- Kesit Bambang Prakosa. 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press: Yogyakarta

- KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*
- Lexy J Moleong. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya: Bandung
- Maimunah Mutiara. 2006, *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI: Yogyakarta
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press: Jakarta
- Moenir, H.A.S. 1990, *Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Gunung Agung: Jakarta
- Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito: Bandung
- Novi Pratiwi Maulida. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Tesis : Universitas Islam Indonesia
- Nur Indah Rachmawaty. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Tesis : Universitas Diponegoro
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyusunan Tata cara Evaluasi Pengendalian Perencanaan Pembangunan*
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No. 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*
- Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2009-2013*
- Rochmad Sumitro. 1987, *Azas dan Dasar Perpajakan*, Eresco: Bandung
- Robert K Ying. 2000, *Studi Kasus (Desain Dan Metode)*, Rajawali Pers: Jakarta
- Sugiyono. 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012*

Lampiran

Tabel 1.
Kondisi Tingkat Pendidikan Dasar di Kota Padang Panjang
Pada Tahun Pelajaran 2011/2012

Tingkat Pendidikan	Status Sekolah		Total	Jumlah siswa		Total	Jumlah lulusan
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta		
TK	1	14	15	73	1.065	1.138	
SD	33	4	37	5.873	613	6.486	943
MI		2	2		619	619	53
SMP	5	6	11	2.681	784	3.465	1.003
MTs	1	5	6	797	716	1.513	396
SMA	3	3	6	1.901	37	2.258	634
MA	3	6	9	1.571	409	1.980	430
SMK	2	3	5	1.429	1.026	2.455	789
Total	48	40	91	14.325	5.269	19.914	4.248

Tabel 2.
Persentase Kelulusan Ujian Nasional Siswa
Sekolah Menengah di Kota Padang Panjang

Satuan	Tahun Akademik		
	2009/2010	2010/2011	2011/2012
SMP/MTs	81,59	97,22	99,10
SMA/MA	88,73	99,26	99,73

Tabel. 3**Program, Kegiatan dan Anggaran****Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2012**

No.	Uraian	JUMLAH ANGGARAN BELANJA (Rp.)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	992,165,000	3,387,749,000	-	4,379,914,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	257,175,000	341,356,000	100,854,000	699,385,000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian	1,325,000	401,800,000	-	403,125,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	58,000,000	-	58,000,000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1,550,000	1,593,000	-	3,143,000
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,049,865,000	80,518,000	21,500,000	1,151,883,000
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	316,722,500	758,798,000	11,284,806,000	12,360,327,000
8	Program Pendidikan Menengah	713,270,000	634,123,000	2,193,685,000	3,541,078,000
9	Program Pendidikan Non Formal	191,945,000	116,650,000	4,880,000	313,475,000
10	Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan	704,570,000	204,749,000	-	909,319,000
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,028,131,150	617,427,000	-	1,645,558,150
TOTAL ANGGARAN					25,465,207,150